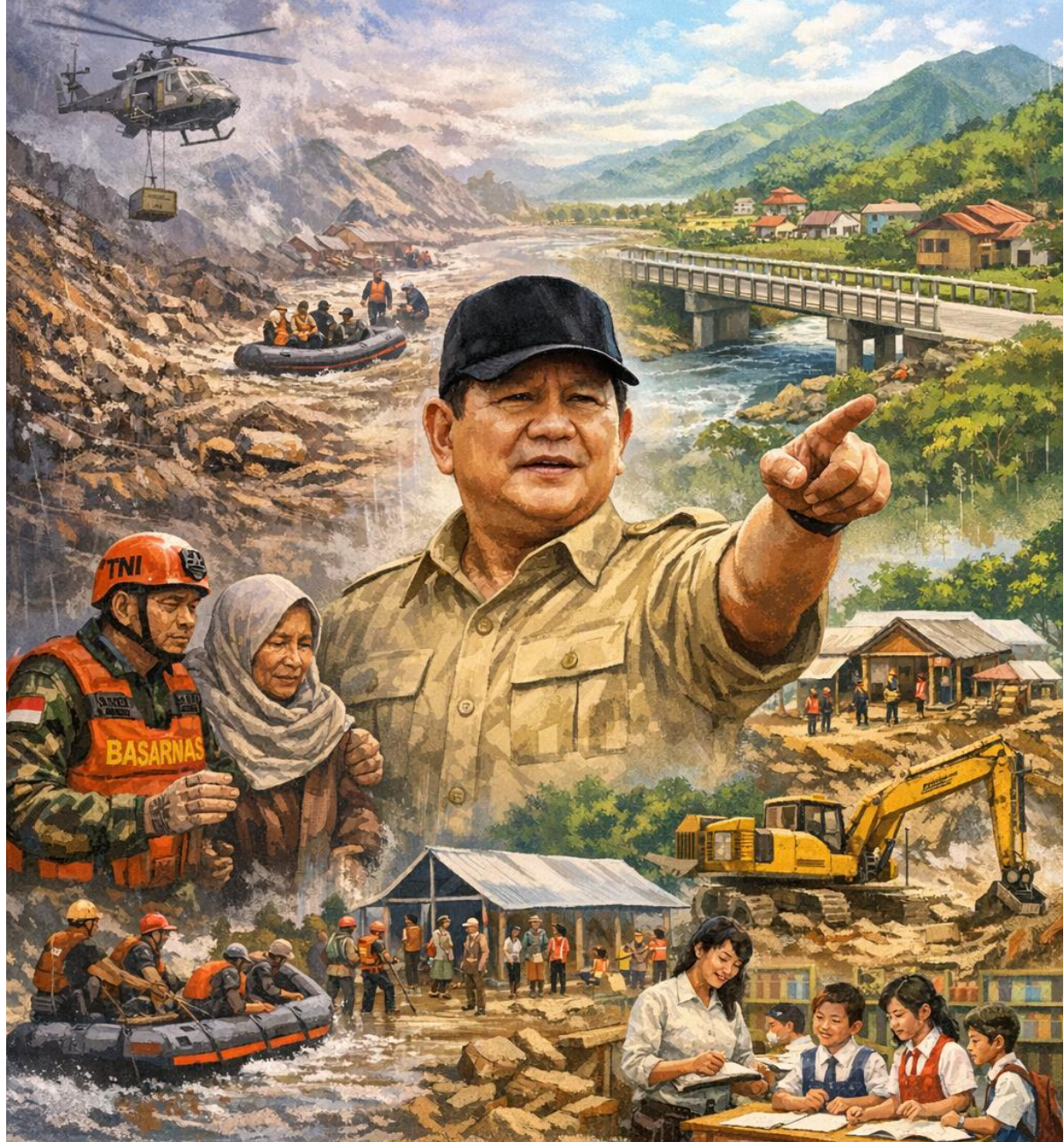


UPAYA PRESIDEN PRABOWO MENANGGULANGI BENCANA DI SUMATERA

Dari “Tanggap Darurat” ke Rehabilitasi Menyeluruh



Oleh: Johnny Wenas Polii dan Rudy C Tarumingkeng

*Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden
Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat"
ke Rehabilitasi Menyeluruh*

Oleh:

Johnny Wenas Polii, BSc, SE, ME
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, MF, PhD

Penerbit:

Center For Indonesia Development Study (CFIDS)

Jakarta, Indonesia



UPAYA PRESIDEN PRABOWO MENANGGULANGI BENCANA DI SUMATERA: DARI "TANGGAP DARURAT" KE REHABILITASI MENYELURUH

1) Pendahuluan: Mengapa "bencana Sumatera" selalu menjadi ujian tata kelola negara

Sumatera—dengan bentang alam pegunungan, lembah sempit, sungai-sungai besar, dan kawasan pesisir—memiliki kerentanan khas terhadap bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, longsor) yang sering dipicu hujan ekstrem, perubahan tata guna lahan, serta rapuhnya infrastruktur penghubung di wilayah berlereng. Ketika banjir bandang dan longsor terjadi, dampaknya bukan hanya korban jiwa dan kerusakan

rumah, tetapi juga "memutus" sistem kehidupan: jalan putus, jembatan runtuh, listrik padam, pasokan BBM terhambat, layanan kesehatan dan pendidikan tersendat, serta komunikasi terputus berhari-hari.

Dalam konteks bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025, pemerintah mengakui bahwa masalahnya bukan sekadar "mendistribusikan bantuan", melainkan memulihkan *fungsi sosial-ekonomi* masyarakat secepat mungkin—mulai dari keselamatan warga, logistik, layanan dasar, sampai hunian dan infrastruktur. Gambaran lapangan yang muncul dalam rilis resmi menunjukkan bahwa akses transportasi dan telekomunikasi sempat terputus selama beberapa hari, yang memperlambat "last mile delivery" (bantuan sampai ke desa paling ujung). ([Kemendikdasmen](#))

Karena itulah, pertanyaan tentang "upaya keras Presiden Prabowo" dapat dibaca sebagai pertanyaan tentang **kepemimpinan eksekutif dalam manajemen bencana**: bagaimana Presiden mendorong koordinasi lintas lembaga, memastikan dana dan logistik tersedia, memerintahkan percepatan pemulihan layanan vital, dan mengarahkan transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi–rekonstruksi yang terukur.

2) Kerangka analitis: Apa arti "upaya keras" dalam manajemen bencana modern?

Dalam studi kebijakan publik, *upaya keras* bukan terutama retorika; ia tampak melalui indikator yang relatif bisa diuji:

1. **Kecepatan keputusan** (speed): keputusan pendanaan, aktivasi posko, mobilisasi personel, dan penentuan prioritas (rescue, logistik, layanan vital).

2. **Skala mobilisasi** (scale): seberapa besar sumber daya (personel, alat berat, moda transportasi darat–laut–udara) yang dikerahkan dan seberapa cepat terintegrasi.
3. **Koordinasi lintas lembaga** (coordination): apakah ada struktur komando/posko terpadu dan pembagian peran yang jelas.
4. **Perlindungan kelompok rentan** (equity): perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah paling terisolasi.
5. **Transisi pemulihan** (recovery): bukan hanya bantuan sementara, tetapi pemulihan infrastruktur dan hunian (huntara→huntap), layanan administrasi, sekolah, kesehatan, energi, komunikasi.
6. **Mitigasi ke depan** (risk reduction): perbaikan tata kelola lingkungan dan penataan ruang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Rangkaian pernyataan dan langkah yang terekam dalam kanal resmi Setkab/Setneg/Wapres serta kementerian terkait menunjukkan keenam unsur ini berjalan sebagai satu paket.

3) Kronologi ringkas (akhir Okt–Des 2025): negara bergerak dari respons ke pemulihan

Beberapa penanda penting yang relevan (berdasarkan rilis resmi dan keterangan pers pemerintah):

- Pemerintah pusat menegaskan bahwa penanganan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak awal dijalankan dengan **skala nasional** (mobilisasi gabungan, dukungan pusat), dan muncul diskusi publik soal "status bencana nasional". ([Setkab](#))
- Menko PMK menyampaikan bahwa Presiden **meninjau langsung** lokasi bencana pada **1 Desember 2025** dan memimpin koordinasi

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

lintas K/L, TNI/Polri, pemda, dan BUMN, sambil menegaskan ketersediaan dana-logistik nasional (termasuk penggunaan Dana Siap Pakai/DSP pada fase darurat). ([Setkab](#))

- Pemerintah mulai menata **fase rehabilitasi-rekonstruksi** dengan target **100 hari** dan rencana kerja **1 tahun**, serta mendorong publik ikut mengawasi capaian secara terukur. ([Setkab](#))
- Wapres Gibran melakukan peninjauan lapangan (Agam, Sumbar) pada **4 Desember 2025** untuk memastikan arahan Presiden dijalankan—mencakup logistik, pembukaan akses wilayah terisolasi, infrastruktur dasar, serta pemulihan energi dan komunikasi. ([Wakil Presiden Republik Indonesia](#))
- Presiden kembali menguatkan fokus pemulihan (khususnya Sumbar) pada **18 Desember 2025**, meninjau huntara dan percepatan infrastruktur (termasuk jembatan Bailey) serta memberi perhatian pada isu lingkungan (penertiban kawasan hutan, izin tambang, dan aktivitas di bantaran sungai). ([Setkab](#))
- Pemerintah memastikan dukungan anggaran dan layanan dasar: tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk puluhan pemda, percepatan layanan Dukcapil, serta rencana pembangunan huntap lintas kementerian dan dukungan non-APBN. ([Setkab](#))
- Bantuan kemanusiaan dan dukungan air bersih-sanitasi terus digerakkan sampai 21 Desember 2025, menunjukkan bahwa dukungan tidak berhenti pada hari-hari awal. ([Setkab](#))

Kronologi ini memperlihatkan pola: **(1) penegasan prioritas nasional + (2) konsolidasi komando + (3) mobilisasi logistik multi-moda + (4) percepatan layanan vital + (5) akselerasi huntara/huntap & infrastruktur + (6) koreksi kebijakan lingkungan sebagai mitigasi.**

4) Inti "upaya keras" Presiden Prabowo: enam lapis intervensi negara

A. Menetapkan status *de facto* sebagai "prioritas nasional" dan menjamin dana-logistik

Dalam keterangan pers di Posko Nasional, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan agar situasi diperlakukan sebagai **prioritas nasional**, dengan jaminan dana dan logistik tersedia penuh; fase darurat menggunakan **Dana Siap Pakai (DSP)**, dan seluruh lembaga diminta ekstra responsif untuk penyelamatan korban, distribusi bantuan, serta pemulihan layanan vital. ([Setkab](#))

Secara tata kelola, ini penting karena pada banyak bencana, hambatan terbesar bukan niat baik, melainkan "bottleneck" administratif: siapa membiayai apa, siapa memutuskan, dan bagaimana memastikan suplai bergerak saat akses terputus. Dengan framing prioritas nasional, Presiden mengunci satu pesan: **jangan menunggu, jangan saling lempar, bergerak dulu.**

B. Memimpin koordinasi lintas lembaga dan memperkuat struktur komando (posko terpadu)

Masih dari keterangan Menko PMK, struktur komando diperkuat melalui **posko terpadu** di provinsi dan kabupaten dengan dukungan BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait; distribusi logistik dipastikan menjangkau wilayah yang aksesnya terputus. ([Setkab](#))

Di sini "upaya keras" bukan hanya kerja lapangan, tetapi **arsitektur koordinasi**. Tanpa komando terpadu, bantuan bisa menumpuk di kota (oversupply) tetapi kosong di desa yang jalannya putus (undersupply). Posko terpadu adalah mekanisme untuk menutup kesenjangan itu.

C. Menggerakkan mobilisasi besar: personel gabungan, alat berat, serta moda darat–laut–udara

Dalam dinamika bencana di Sumatera, tantangan utamanya sering berupa *geografi sulit* (kabut cepat turun, jalur sempit, jembatan putus, lembah curam). Presiden menyinggung realitas ini dalam pernyataan publiknya: akses ke desa terpencil ditempuh dengan helikopter, dan percepatan pembangunan jembatan dilakukan dengan kerja siang–malam. ([Setneg](#))

Sementara itu, Setkab mencatat distribusi logistik dilakukan melalui berbagai titik dan moda—bahkan untuk wilayah yang jalur daratnya putus, opsi laut/udara dipakai, termasuk dukungan perangkat komunikasi dan peralatan dasar di lokasi terdampak. ([Kemendikdasmen](#))

Pada level kebijakan, ini menunjukkan “keseriusan operasional”: **negara tidak memaksakan satu cara**. Ketika darat putus, laut dan udara diaktifkan; ketika komunikasi terputus, perangkat pendukung disiapkan.

D. Memulihkan layanan vital: energi, komunikasi, kesehatan, sekolah, dan administrasi kependudukan

Wapres, saat meninjau Agam, merangkum arahan Presiden yang mencakup pemulihan layanan energi dan komunikasi, percepatan perbaikan akses puskesmas–sekolah–jembatan–jalan agar arus logistik (termasuk BBM) kembali lancar. ([Wakil Presiden Republik Indonesia](#))

Pada sektor pendidikan—yang sering “tak terlihat” namun menentukan pemulihan psikologis dan rutinitas keluarga—Kemendikdasmen melaporkan pendirian tenda darurat, mitigasi/pemetaan untuk memastikan belajar-mengajar tetap berjalan, serta alokasi dana tanggap darurat tahap pertama > **Rp4 miliar**; juga pendataan satuan pendidikan terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar (total **1.009** satuan pendidikan). ([Kemendikdasmen](#))

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri mempercepat layanan Dukcapil dengan membentuk tim ke tiga provinsi untuk pengurusan dokumen (KTP, akta kelahiran, dll.) tanpa biaya—yang krusial untuk akses bantuan, layanan kesehatan, dan perbankan pascabencana. ([Setkab](#))

Maknanya: Presiden tidak membatasi respons pada logistik makanan; negara juga memulihkan *kapasitas warga untuk kembali "berfungsi" sebagai warga*—punya dokumen, punya sekolah, punya layanan kesehatan.

E. Hunian sebagai pusat pemulihan: dari pengungsian → huntara → relokasi → huntap

Salah satu indikator "upaya keras" paling konkret adalah fokus pada hunian, karena hunian adalah simpul yang menghubungkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenangan sosial.

- Di Sumbar, Presiden meninjau pembangunan sekitar **100 huntara** di Kayu Pasak Palembayan (Agam) untuk mengurangi pengungsi di posko, sekaligus mendorong agar relokasi ke hunian tetap dipercepat bila memungkinkan. ([Setkab](#))
- Pemerintah merencanakan pembangunan **huntap 2.600 unit** (Aceh 1.000, Sumut 1.000, Sumbar 600) melalui dukungan lintas kementerian dan bantuan non-APBN, dengan agenda *groundbreaking* di beberapa lokasi. ([Setkab](#))

Secara kebijakan publik, fokus huntara/huntap adalah cara menghindari "jebakan pengungsian berkepanjangan" yang biasanya melahirkan masalah lanjutan: penyakit, konflik sosial, kehilangan pekerjaan, anak putus sekolah, dan trauma kolektif.

F. Infrastruktur penghubung dipercepat: jembatan Bailey, jalan nasional, dan akses logistik

Pemulihan Sumatera pascabencana sangat bergantung pada "connectivity". Presiden meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang (akses penghubung) dan perbaikan ruas jalan nasional di Lembah Anai; pemerintah menargetkan percepatan agar jalur Padang–Bukittinggi tersambung kembali. ([Setkab](#))

Dalam bahasa sederhana: **tanpa jalan dan jembatan, semua bantuan hanya akan menjadi berita; dengan jalan dan jembatan, bantuan menjadi kenyataan.**

5) Tiga narasi kasus: bagaimana arahan Presiden diterjemahkan menjadi kerja lapangan

Kasus 1 — "Last mile delivery" di Agam: motor, lumpur, dan dapur umum

Rilis Wapres menggambarkan realitas lapangan: akses menuju Desa Salareh Aia (Palembayan) terbatas sehingga peninjauan dilanjutkan dengan sepeda motor; rumah-rumah hancur, lumpur setinggi lutut, puing kayu besar, dan posisi desa di cekungan perbukitan membuat material banjir bertemu secara mendadak. Wapres memastikan dapur umum/posko berjalan, kebutuhan dasar terpenuhi (makanan, sanitasi, layanan dasar), dan bantuan untuk anak-anak juga disalurkan. ([Wakil Presiden Republik Indonesia](#))

Secara manajerial, ini bukan sekadar simbol; ini menunjukkan persoalan "last mile": bantuan harus menembus keterbatasan akses, bukan berhenti di titik yang mudah dijangkau.

Kasus 2 — Jembatan Bailey dan kerja siang-malam: mengembalikan konektivitas ekonomi

Setkab mencatat adanya percepatan pembangunan jembatan Bailey di wilayah terdampak, dan secara keseluruhan disebut ada sekitar **35 Bailey**

yang proses pengerjaannya dikebut untuk menyambungkan akses yang putus. ([Setkab](#))

Dalam sistem logistik bencana, jembatan bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan *infrastruktur sosial*: ia membuka arus barang, mempercepat evakuasi, memungkinkan tenaga kesehatan masuk, dan mengembalikan aktivitas ekonomi dasar.

Kasus 3 — Aceh Tamiang: air bersih, sanitasi, dan kebutuhan perempuan-anak

Bantuan yang digerakkan Setkab menuju Aceh Tamiang memperlihatkan orientasi "kebutuhan nyata": lebih dari 50 truk tangki air bersih, serta suplai barang yang menargetkan kebutuhan dasar pengungsi—termasuk kebutuhan perempuan dan anak. Dalam rilis yang sama, disebut adanya dukungan sarana sanitasi/air bersih dan alat berat di Aceh melalui Kementerian PUPR. ([Setkab](#))

Dalam perspektif kebijakan sosial, air bersih dan sanitasi sering menjadi faktor penentu apakah pengungsian berubah menjadi krisis kesehatan. Karena itu, fokus air bersih adalah intervensi yang "diam-diam menyelamatkan".

6) Dari respons cepat ke pemulihan terukur: target 100 hari dan 1 tahun

Salah satu elemen paling kuat dari "upaya keras" adalah **mendesain pemulihan agar dapat diukur**. Pemerintah menyatakan bahwa fase rehab-rekon disiapkan dengan target **100 hari** dan *timeline 1 tahun*, serta publik diharapkan mengawasi capaian secara terukur. ([Setkab](#))

Ini penting karena masalah klasik pascabencana adalah "fase darurat selesai, sorotan pindah, pemulihan melambat". Ketika target dan *timeline*

diumumkan, ia menjadi mekanisme akuntabilitas: pemerintah pusat, pemda, dan BUMN punya kerangka kerja bersama.

7) Mitigasi jangka panjang: pembenahan lingkungan, izin, dan bantaran sungai

Bencana banjir bandang dan longsor sering memunculkan debat tentang *akar masalah*: perubahan tutupan lahan, praktik usaha di kawasan rawan, dan lemahnya penataan ruang. Dalam kunjungan di Sumbar, Presiden menaruh perhatian pada "pekerjaan rumah lingkungan": penertiban kawasan hutan, izin pertambangan, dan izin pembukaan usaha di bantaran sungai—serta menyampaikannya kepada jajaran pemda. ([Setkab](#))

Secara kebijakan, ini menunjukkan bahwa Presiden mencoba mendorong respons yang tidak berhenti pada "mengobati gejala", melainkan menyentuh faktor risiko yang memperbesar dampak bencana.

8) Catatan kritis (akademik): mengukur keberhasilan tanpa jatuh pada propaganda

Agar penjelasan ini tetap ilmiah, ada dua hal yang perlu ditegaskan:

1. **Angka dan klaim dapat berubah** seiring pembaruan data lapangan. Karena itu, pernyataan mengenai skala mobilisasi dan besaran dana sebaiknya dibaca sebagai "keterangan resmi pada saat itu", bukan vonis final. Misalnya, Setkab memuat pernyataan tentang mobilisasi personel dan dukungan pendanaan dalam konteks merespons perdebatan publik soal status bencana nasional. ([Setkab](#))
2. Keberhasilan tidak cukup diukur dari "jumlah bantuan keluar", tetapi dari hasil nyata di warga: berapa desa tersambung kembali,

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

berapa huntera/huntau terbangun, berapa sekolah kembali berjalan, berapa layanan kesehatan pulih, dan seberapa cepat aktivitas ekonomi dasar kembali.

Dengan kata lain: *upaya keras* harus diuji dengan indikator output–outcome, bukan hanya narasi.

9) Penutup: “negara hadir” sebagai kerja yang menyambung hidup

Dari rilis resmi Setkab, Setneg, Wapres, dan Kemendikdasmen, pola besar yang tampak adalah: Presiden Prabowo mendorong penanganan bencana di Sumatera sebagai **prioritas nasional**, menekankan **koordinasi lintas lembaga**, menjamin **ketersediaan dana dan logistik** (termasuk DSP), serta memacu transisi dari **tanggap darurat** menuju **rehabilitasi–rekonstruksi** yang ditargetkan (100 hari dan 1 tahun). ([Setkab](#))

Pada level implementasi, kerja keras itu terlihat dalam:

- pemulihan layanan vital (energi, komunikasi, sekolah, kesehatan), ([Wakil Presiden Republik Indonesia](#))
- percepatan hunian (huntera→huntau) sebagai pusat pemulihan, ([Setkab](#))
- perbaikan konektivitas (jembatan Bailey, ruas jalan nasional), ([Setkab](#))
- dukungan air bersih dan kebutuhan kelompok rentan, ([Setkab](#))
- serta koreksi mitigasi melalui penertiban aspek lingkungan dan perizinan. ([Setkab](#))

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

Berikut "makalah akademik"—lebih sistematis, dengan kerangka teori, narasi kasus, dan rancangan indikator evaluasi 100 hari–1 tahun, berbasis rilis/komunikasi resmi lembaga negara dan kanal pemerintah.

Abstrak

Rangkaian banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November–Desember 2025 menghadirkan ujian nyata bagi kepemimpinan eksekutif dan kapasitas tata kelola bencana di Indonesia. Respons Presiden Prabowo Subianto dapat dibaca sebagai upaya menggeser penanganan bencana dari sekadar *distribusi bantuan* menuju *pemulihan fungsi kehidupan* (life-function recovery), melalui: (1) penetapan prioritas nasional dan jaminan pendanaan–logistik; (2) penguatan komando lintas lembaga dengan BNPB sebagai *lead agency* fase darurat; (3) percepatan pemulihan konektivitas (jalan/jembatan), layanan dasar (air bersih, sanitasi, listrik, komunikasi), serta layanan administratif (Dukcapil); (4) akselerasi hunian sementara (huntara) dan rancangan hunian tetap (huntap); dan (5) transisi ke rehabilitasi–rekonstruksi berbasis target 100 hari dan rencana kerja 1 tahun. Dengan memanfaatkan kerangka Sendai Framework (khususnya *Build Back Better*), artikel ini menyajikan analisis kebijakan dan desain indikator evaluasi untuk menilai ketepatan, keadilan, dan keberlanjutan pemulihan pascabencana.

Kata kunci: manajemen bencana; kepemimpinan krisis; koordinasi lintas lembaga; rehabilitasi–rekonstruksi; *build back better*; Sumatera.

1. Pendahuluan: "Bencana Sumatera" sebagai ujian negara—bukan hanya ujian cuaca

Dalam literatur kebijakan publik, bencana besar jarang dipahami sebagai peristiwa alam semata. Ia merupakan "peristiwa sosial-politik" karena dampaknya menembus jaringan kehidupan: ekonomi rumah tangga, layanan kesehatan, sekolah, transportasi, energi, komunikasi, dan administrasi negara. Di Sumatera, kerentanan geografis (lereng, lembah, aliran sungai) berinteraksi dengan intensitas hujan ekstrem dan kondisi lingkungan. Saat akses transportasi dan telekomunikasi terputus berhari-hari, kemampuan negara diuji pada aspek paling praktis: seberapa cepat bantuan menembus "kilometer terakhir" menuju desa terisolasi. Kemendikdasmen, misalnya, menyebut putusnya akses transportasi dan telekomunikasi hingga sekitar lima hari pascakejadian di tiga provinsi terdampak. ([Kemendikdasmen](#))

Dalam situasi semacam ini, "upaya keras Presiden" tidak dapat hanya diukur dari kunjungan atau pernyataan, melainkan dari *arsitektur keputusan* (pendanaan, komando, target pemulihan), *skala mobilisasi* (logistik, personel, alat berat), dan *hasil pemulihan* (akses pulih, sekolah berjalan, layanan dasar berfungsi, hunian tersedia). Rangkaian rilis resmi menunjukkan Presiden memulai langkah dengan melakukan kunjungan/peninjauan ke wilayah terdampak pada 1 Desember 2025. ([Presiden RI](#))

2. Kerangka teori: siklus bencana, kepemimpinan krisis, dan Sendai Framework

2.1 Siklus manajemen bencana dan mandat negara

Siklus kebencanaan umumnya mencakup pra-bencana (pencegahan–mitigasi–kesiapsiagaan), saat bencana (tanggap darurat), dan pasca-bencana (rehabilitasi–rekonstruksi). Pada level regulasi Indonesia, penanggulangan bencana mencakup pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagai rangkaian kebijakan publik. ([BNPB](#))

2.2 Sendai Framework dan "Build Back Better"

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 menekankan empat prioritas: memahami risiko; memperkuat tata kelola risiko; investasi pengurangan risiko; dan kesiapsiagaan untuk respons efektif serta *Build Back Better* (BBB) pada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. ([UNDRR](#))

Konsep BBB relevan karena ia menggeser pemulihan dari "mengembalikan seperti semula" menjadi "membangun kembali lebih aman dan tangguh."

2.3 Kepemimpinan krisis sebagai *governance accelerator*

Kepemimpinan krisis yang efektif biasanya ditandai oleh:

1. keputusan cepat dengan legitimasi kuat,
2. koordinasi lintas organisasi,
3. komunikasi risiko yang jelas,
4. perlindungan kelompok rentan,
5. pengelolaan transisi darurat → pemulihan,
6. pembelajaran kebijakan (policy learning).

Kerangka ini akan dipakai untuk membaca rangkaian kebijakan dan aksi lapangan pemerintah.

3. Metode analisis: kajian dokumen dan penelusuran rilis resmi

Tulisan ini menggunakan pendekatan *document-based policy analysis*, memeriksa rilis/siaran pers dan informasi resmi dari:

- Kantor Staf/Komunikasi pemerintah (Setkab), ([Setkab](#))
- Situs Presiden RI (Siaran Pers Presiden), ([Presiden RI](#))

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

- Setneg (laporan kabinet), ([Setneg](#))
 - Kemendikdasmen (dukungan pendidikan), ([Kemendikdasmen](#))
 - Kemendagri/Dukcapil dan kanal pemerintah (InfoPublik), ([Infopublik](#))
 - Kementerian PU (air bersih–sanitasi), ([sitaba.pu.go.id](#))
 - BNPB (logistik/dukungan), ([BNPB](#))
 - serta pelengkap dari media arus utama untuk konteks kebijakan anggaran. ([detiknews](#))
-

4. Temuan utama: enam lapis “upaya keras” Presiden Prabowo

4.1 Lapis 1 — Menetapkan prioritas nasional dan mengunci akses pendanaan–logistik

Dalam keterangan pemerintah, Presiden menginstruksikan agar penanganan bencana menjadi prioritas nasional dan memastikan dana serta logistik nasional tersedia. ([Setkab](#))

Ini penting karena pada fase darurat, hambatan terbesar sering bukan “ketiadaan niat”, melainkan friksi administratif: siapa memutuskan, siapa membayar, dan bagaimana mempercepat belanja darurat.

Di sisi pendanaan operasional darurat, pemerintah juga menegaskan ketersediaan Dana Siap Pakai BNPB; Menteri Keuangan menyatakan masih tersedia dana siap pakai yang bisa digunakan dan pemerintah siap menambah bila diperlukan. ([ANTARA News Jambi](#))

4.2 Lapis 2 — Komando terpadu lintas lembaga: BNPB sebagai *lead agency* fase darurat

Setkab menegaskan BNPB memimpin fase tanggap darurat, sementara fase rehabilitasi–rekonstruksi dipersiapkan sejak dini. ([Setkab](#))

Secara tata kelola, ini adalah desain yang lazim: *unity of command* pada darurat untuk menghindari duplikasi dan kekosongan peran, tetapi sekaligus menyiapkan "jalur pemulihan" agar tidak berhenti di bantuan logistik.

Dalam praktik, desain ini tampak lewat penguatan posko, mobilisasi gabungan, dan penekanan bahwa respons ditingkatkan "setiap jam dan menit" (bahasa administratif untuk menunjukkan *continuous operation*). ([Setkab](#))

4.3 Lapis 3 — Transisi cepat ke pemulihan terukur: target 100 hari dan rencana 1 tahun

Salah satu pembeda respons yang kuat adalah pernyataan bahwa pemerintah mulai menata fase rehabilitasi–rekonstruksi dengan target 100 hari dan *timeline* 1 tahun, agar capaian dapat diawasi publik secara terukur. ([Setkab](#))

Dalam studi kebijakan, target semacam ini adalah instrumen akuntabilitas: memaksa kementerian/lembaga dan pemda menyelaraskan rencana kerja, sekaligus menekan risiko "pemulihan melambat ketika sorotan publik pindah."

4.4 Lapis 4 — Mengembalikan konektivitas: jembatan Bailey, ruas jalan, dan "membuka isolasi"

Pada bencana banjir bandang–longsor, konektivitas adalah "tombol pemulihan." Presiden meninjau langsung pembangunan Jembatan Bailey dan pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat, sebagai upaya memulihkan konektivitas dan mempercepat pemulihan. ([Presiden RI](#)) Setkab juga melaporkan peninjauan Presiden atas posko pengungsi sekaligus pembangunan huntara di Agam. ([Setkab](#))

Narasi kasus (konektivitas sebagai *life-line*):

Bayangkan satu nagari di wilayah perbukitan; jalan tergerus, jembatan putus, sinyal hilang. Dalam kondisi itu, truk logistik tidak bisa masuk,

ambulans tidak bisa keluar, dan keluarga korban tidak bisa mengurus identitas atau bantuan. Maka, ketika jembatan Bailey dipasang, yang "pulih" bukan hanya jalan, tetapi rantai pasok kehidupan: pangan, BBM, obat, guru, dan tenaga kesehatan.

4.5 Lapis 5 — Memulihkan layanan dasar (air bersih–sanitasi, kesehatan, pendidikan) dan layanan administratif (Dukcapil)

(a) Air bersih dan sanitasi

Kementerian PU menyalurkan bantuan sarana air bersih dan sanitasi serta tim tanggap darurat untuk wilayah terdampak (misalnya Aceh Tamiang), dengan fokus pada layanan dasar yang aman selama masa darurat. (sitaba.pu.go.id)

Dalam teori krisis kesehatan masyarakat, air bersih–sanitasi merupakan "pagar pertama" agar pengungsian tidak berubah menjadi krisis penyakit.

(b) Pendidikan sebagai pemulihan rutinitas sosial

Kemendikdasmen melaporkan penyaluran bantuan pendidikan darurat, termasuk ruang kelas darurat dan perlengkapan belajar, untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran bagi wilayah terdampak.

([Kemendikdasmen](#))

Data yang sama juga menyebut besaran dampak yang luas: 1.009 satuan pendidikan terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. ([Spab](#))

Presiden juga menerima laporan Mendikdasmen dalam Sidang Kabinet mengenai langkah penanganan dampak banjir pada sektor pendidikan.

([Setneg](#))

Narasi kasus (sekolah darurat sebagai stabilisator sosial):

Pada hari-hari setelah banjir, anak-anak menyaksikan rumah berlumpur, orang tua kehilangan barang, dan suasana duka. Ketika sekolah darurat berjalan—meski di tenda—ia memberi ritme: bangun, belajar, bertemu teman, ada harapan. Ini bukan romantisasi; ini adalah strategi pemulihan psikososial berbasis institusi.

(c) Layanan adminduk (Dukcapil) agar warga bisa mengakses hak Kemendagri menerbitkan Surat Edaran untuk mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk penerbitan dokumen dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan. ([detiknews](#))

InfoPublik mencatat Kemendagri mengerahkan tim ke provinsi terdampak untuk percepatan layanan Dukcapil pascabencana. ([Infopublik](#))

Mengapa ini signifikan?

Dalam banyak bencana, bantuan sosial, layanan kesehatan, akses pendidikan, bahkan akses perbankan/keuangan sering memerlukan identitas. Ketika dokumen hilang, bencana "memanjang" menjadi eksklusi administratif. Percepatan Dukcapil adalah kebijakan teknokratis, tetapi dampaknya sangat manusiawi.

4.6 Lapis 6 — Hunian sebagai pusat pemulihan: huntara sekarang, huntap berikutnya

Setkab melaporkan Presiden meninjau posko pengungsi di SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan dan meninjau pembangunan hunian sementara (huntara). ([Setkab](#))

Siaran pers Presiden RI juga menegaskan kunjungan Presiden ke kabupaten terdampak di Sumbar untuk percepatan pemulihan hunian dan infrastruktur. ([Presiden RI](#))

Narasi kasus (huntara sebagai "jembatan" pemulihan):

Tenda darurat menyelamatkan nyawa pada hari pertama, tetapi tidak ideal untuk berminggu-minggu: risiko infeksi naik, privasi hilang, anak sulit belajar, dan konflik sosial meningkat. Huntara adalah "struktur transisi"—membeli waktu agar perencanaan huntap tidak asal-asalan, namun korban tidak dibiarkan tinggal lama di tenda.

5. Mobilisasi lapangan: kunjungan Presiden, "delegasi pengawasan" oleh Wapres, dan mesin koordinasi

5.1 Kunjungan Presiden sebagai *signal of urgency* + mekanisme percepatan

Presiden bertolak ke wilayah terdampak pada 1 Desember 2025 untuk meninjau kondisi di lapangan. ([Presiden RI](#))

Dalam literatur kepemimpinan krisis, kunjungan pemimpin tertinggi memiliki dua fungsi: (1) *signaling* (mengirim sinyal urgensi ke birokrasi), dan (2) *problem-sensing* (mendapatkan informasi langsung tentang hambatan lapangan yang sering tidak tertangkap laporan formal).

5.2 Wapres sebagai *implementation guardian*: memastikan arahan berjalan

Wapres Gibran meninjau lokasi banjir bandang di Agam dan melanjutkan peninjauan ke wilayah terdampak lain (misalnya Tapanuli Selatan) menggunakan helikopter, menunjukkan fokus pada akses dan koordinasi lapangan. ([Menpan](#))

Model "Presiden menetapkan arah—Wapres mengawal eksekusi" ini lazim dalam krisis berskala luas agar rantai komando tetap rapat.

5.3 BNPB dan dukungan logistik: bukti "negara bergerak"

BNPB menyalurkan bantuan logistik (pangan dan nonpangan) untuk korban bencana di tiga wilayah terdampak. ([BNPB](#))

Pada level kebijakan, bantuan BNPB adalah "substrat" darurat; namun yang lebih krusial adalah bagaimana bantuan itu diintegrasikan dengan pembukaan akses, pemulihan layanan dasar, dan penataan pemulihan 100 hari.

6. Dimensi fiskal: BTT sebagai instrumen "kecepatan" di daerah

Pada fase darurat, pemerintah daerah sering terjepit: kebutuhan melonjak, tetapi ruang fiskal sempit (apalagi akhir tahun anggaran). Karena itu, tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pusat menjadi instrumen percepatan.

Mendagri menyampaikan bantuan BTT dan memastikan penggunaannya tepat sasaran; media melaporkan total transfer Rp268 miliar (terdiri dari alokasi untuk provinsi dan puluhan kabupaten/kota terdampak).

([detiknews](#))

InfoPublik juga menekankan BTT untuk kebutuhan individual, termasuk kebutuhan perempuan dan bayi—indikator perhatian pada kelompok rentan. ([Infopublik](#))

Catatan akademik:

BTT adalah contoh "policy instrument for agility." Dalam krisis, desain instrumen bukan sekadar akuntansi; ia menentukan apakah negara mampu bergerak cepat tanpa melanggar tata kelola.

7. Rancangan evaluasi: bagaimana menilai "upaya keras" secara terukur (100 hari dan 1 tahun)

Karena pemerintah menyebut target 100 hari dan *timeline* 1 tahun, ([Setkab](#)) maka evaluasi idealnya memiliki *dashboard* yang sederhana namun tajam. Berikut rancangan indikator (bisa Bapak jadikan lampiran modul atau kerangka penelitian kebijakan):

7.1 Indikator 100 hari (output cepat)

1. Akses & konektivitas

- Persentase jalan/jembatan vital yang kembali berfungsi (akses logistik, ambulans, sekolah).
- Waktu tempuh ke titik layanan dasar (puskesmas, sekolah) sebelum vs sesudah pemulihan.

2. Layanan dasar

- Cakupan air bersih darurat dan sanitasi di titik pengungsian.
(sitaba.pu.go.id)
- Pemulihan listrik/telekomunikasi di desa prioritas (berbasis laporan pemda/operator).

3. Hunian transisi

- Jumlah hunian terbangun/terisi dan standar minimum kelayakan (air, sanitasi, ventilasi).
- Pengurangan jumlah keluarga di tenda (indikator *decongestion*).

4. Pemulihan layanan sosial

- Sekolah darurat berjalan dan distribusi perlengkapan belajar.
(Kemendikdasmen)
- Layanan Dukcapil darurat berjalan dan jumlah dokumen dipulihkan. (detiknews)

7.2 Indikator 1 tahun (outcome pemulihan + pengurangan risiko)

1. Hunian tetap (huntap) dan relokasi aman

- Proporsi keluarga yang pindah ke hunian tetap aman (di luar zona risiko tinggi).
- Kepatuhan penataan ruang dan mitigasi (drainase, sabo/normalisasi tertentu bila perlu, penguatan tebing, dsb).

2. Pemulihan ekonomi lokal

- Pemulihan UMKM dan pasar lokal; dukungan modal kerja; pemulihan rantai pasok.
- Pemulihan lahan pertanian/perkebunan terdampak.

3. Build Back Better

- Infrastruktur dibangun dengan standar risiko lebih baik (banjir/longsor).
- Sistem peringatan dini dan jalur evakuasi diperkuat.

4. **Governance & compliance**

- Penertiban aktivitas berisiko di bantaran sungai/lereng dan penegakan tata ruang (indikator sensitif, tapi krusial).

8. Diskusi kritis: kekuatan, tantangan, dan agenda perbaikan

8.1 Kekuatan respons yang tampak dari dokumen resmi

1. **Penguncian arah kebijakan:** prioritas nasional, jaminan logistik, dan struktur komando (BNPB). ([Setkab](#))
2. **Pemulihan fungsi kehidupan, bukan sekadar bantuan:** pendidikan, Dukcapil, air bersih–sanitasi. ([Kemendikdasmen](#))
3. **Transisi pemulihan terukur:** 100 hari dan 1 tahun. ([Setkab](#))
4. **Fiskal adaptif:** BTT untuk menutup kesenjangan kapasitas daerah. ([detiknews](#))

8.2 Tantangan klasik yang perlu diantisipasi (berdasarkan pola kebijakan bencana)

1. **Bottleneck “kilometer terakhir”** ketika akses masih putus (butuh inovasi logistik).
2. **Risiko pengungsian berkepanjangan** bila huntara/huntap melambat.
3. **Koordinasi data:** angka dampak, kebutuhan, dan distribusi sering tidak sinkron jika sistem pelaporan tidak terpadu.

4. **Mitigasi struktural vs non-struktural:** pembangunan fisik penting, tetapi penataan ruang, kepatuhan, dan perubahan perilaku sama pentingnya.
5. **Keadilan pemulihan:** siapa yang pulih duluan? wilayah mudah dijangkau sering pulih lebih cepat daripada wilayah terpencil—ini harus diawasi.

9. Penutup: makna “upaya keras” sebagai kerja yang menyambung hidup

Dari rangkaian sumber resmi, terlihat bahwa respons Presiden Prabowo terhadap bencana di Sumatera dibangun dalam tiga logika besar:

1. **Urgensi dan mobilisasi** (kunjungan awal, prioritas nasional, pendanaan siap pakai). ([Presiden RI](#))
2. **Koordinasi dan pemulihan layanan** (BNPB sebagai lead, dukungan air bersih–sanitasi, pendidikan darurat, pemulihan adminduk). ([Setkab](#))
3. **Pemulihan terukur dan *Build Back Better*** (target 100 hari dan rencana 1 tahun; fokus hunian dan infrastruktur). ([Setkab](#))

Dengan kerangka Sendai, respons ini paling tepat dibaca sebagai upaya menggeser negara dari “sekadar hadir” menuju “membangun ketangguhan”—yakni memastikan warga bukan hanya selamat hari ini, tetapi punya jalur untuk kembali hidup bermartabat esok hari. ([UNDRR](#))

Baik, berikut **bagian Diskusi** yang bisa Bapak gunakan sebagai "Refleksi & Diskusi Kelas" untuk topik **upaya Presiden Prabowo dalam menanggulangi bencana di Sumatera**—dengan gaya analitis, namun tetap naratif dan aplikatif.

Diskusi Akademik: Membaca "Upaya Keras" sebagai Tata Kelola Krisis

Bayangkan seorang kepala negara berdiri di antara dua waktu: **waktu darurat** (jam-menit menyelamatkan nyawa) dan **waktu pemulihan** (bulan-tahun mengembalikan martabat hidup). Pada bencana besar, keputusan yang tampak sederhana—" kirim bantuan", "bangun jembatan", "buat huntara"—sebenarnya adalah keputusan yang menyatukan *politik anggaran, koordinasi birokrasi, logistik lapangan, dan etika publik*.

Dalam rilis resmi pemerintah, Presiden menekankan penanganan sebagai prioritas nasional, mengandalkan struktur komando (BNPB sebagai *lead agency* fase darurat), menyiapkan transisi rehabilitasi–rekonstruksi dengan target 100 hari dan 1 tahun, serta memastikan dukungan layanan dasar dan pemulihan konektivitas.

Pertanyaannya: **apakah desain kebijakan ini "cukup" untuk menjawab kompleksitas bencana Sumatera?** Di bawah ini, diskusi dibuat dalam 10 isu kunci.

1) Status "bencana nasional" vs "prioritas nasional": apa bedanya secara kebijakan?

Di ruang publik, selalu ada perdebatan: apakah harus ditetapkan sebagai "bencana nasional" atau cukup "prioritas nasional". Dalam praktik manajemen kebijakan, istilah "prioritas nasional" yang ditekankan

pemerintah menandai bahwa sumber daya pusat digerakkan penuh (komando, dana, logistik) tanpa menunggu eskalasi simbolik.

Isu diskusi:

- Apakah perdebatan status membantu percepatan respon, atau justru membuang energi?
 - Kapan "status" menjadi penting (misalnya untuk pembiayaan tertentu, mobilisasi lintas wilayah, atau legitimasi politik)?
-

2) Koordinasi pusat–daerah: mengapa komando terpadu sering lebih sulit daripada mengirim bantuan?

Bencana besar adalah situasi "multi-aktor": BNPB, kementerian teknis, TNI/Polri, pemda, BUMN, relawan, organisasi sosial, hingga komunitas lokal. Pemerintah menekankan BNPB memimpin fase darurat dan memperkuat posko/koordinasi lintas lembaga.

Isu diskusi:

- Apakah desain komando terpadu sudah cukup jelas "siapa melakukan apa"?
 - Bagaimana mencegah tumpang tindih bantuan di kota tetapi defisit di desa terpencil (masalah "last mile")?
-

3) Logistik "last mile": saat jalan putus, bantuan bukan soal niat—melainkan akses

Salah satu pelajaran bencana di Sumatera adalah: *bantuan bisa banyak, tetapi tidak sampai*. Pemerintah mengakui adanya putus akses transportasi dan telekomunikasi di sejumlah wilayah, sehingga perlu strategi distribusi yang adaptif.

Isu diskusi:

- Apakah negara memiliki "arsenal logistik" yang cukup untuk wilayah terisolasi (darat–laut–udara, gudang antara, *staging area*)?
 - Bagaimana memastikan distribusi adil ketika data kebutuhan berubah cepat dari hari ke hari?
-

4) Pemulihan konektivitas: jembatan Bailey dan jalan adalah kebijakan sosial, bukan sekadar proyek teknik

Presiden meninjau pembangunan jembatan Bailey dan pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat sebagai pengungkit pemulihan.

Dalam narasi kebijakan, jembatan adalah "pembuka urat nadi": ia mengembalikan arus logistik, akses layanan kesehatan, mobilitas guru, serta aktivitas ekonomi dasar. **Tanpa konektivitas, bantuan menjadi episodik. Dengan konektivitas, pemulihan menjadi sistemik.**

Isu diskusi:

- Apakah pemulihan konektivitas seharusnya jadi prioritas #1 setelah operasi SAR stabil?
 - Bagaimana menyeimbangkan percepatan konstruksi dengan standar keselamatan (risiko kegagalan konstruksi di cuaca buruk)?
-

5) Air bersih dan sanitasi: "bencana kedua" yang sering tak terlihat

Banyak pengungsian tidak jatuh karena kekurangan makanan, melainkan karena *krisis air bersih, sanitasi, dan penyakit*. Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih dan sanitasi untuk wilayah terdampak (misalnya Aceh Tamiang), sebagai bagian layanan dasar.

Isu diskusi:

- Apakah standar minimum WASH (*water, sanitation, hygiene*) sudah dijadikan KPI tanggap darurat?
 - Bagaimana mekanisme pemeliharaan sarana air bersih setelah fase darurat—agar tidak rusak/ditinggalkan?
-

6) Pendidikan darurat: sekolah bukan sekadar “kurikulum”, tetapi pemulihan psikososial

Kemendikdasmen menyalurkan bantuan pendidikan darurat (ruang belajar darurat, perlengkapan belajar) dan melaporkan dampak luas pada satuan pendidikan di Aceh, Sumut, Sumbar.

Presiden juga menerima laporan terkait langkah penanganan dampak banjir pada sektor pendidikan.

Isu diskusi:

- Mengapa membuka kembali proses belajar (meski sederhana) mempercepat pemulihan keluarga?
 - Bagaimana mengintegrasikan layanan psikologis (*trauma healing*) ke sekolah darurat tanpa membebani guru?
-

7) Dukcapil dan dokumen: dimensi “kewargaan” pascabencana

Kemendagri menerbitkan kebijakan percepatan layanan adminduk dan melakukan langkah pemulihan layanan Dukcapil pascabencana.

Ini sering luput dalam narasi publik, padahal dokumen identitas menentukan akses terhadap bantuan, layanan kesehatan, dan berbagai layanan sosial-ekonomi.

Isu diskusi:

- Apakah layanan dokumen darurat harus menjadi "paket standar" setiap bencana besar?
 - Bagaimana mencegah eksklusi administratif pada warga yang kehilangan semua dokumen?
-

8) Huntara dan huntap: pusat pertarungan kebijakan pascabencana adalah tanah, relokasi, dan waktu

Presiden meninjau posko pengungsi dan pembangunan hunian sementara.

Secara kebijakan, huntara adalah jembatan; huntap adalah tujuan. Namun pada praktiknya, **huntap** sering tersandung: status tanah, penerimaan warga, ketersediaan infrastruktur, hingga konflik kepentingan.

Isu diskusi:

- Kapan relokasi "wajib" demi keselamatan, dan kapan "adaptasi setempat" lebih realistis?
 - Bagaimana memastikan huntap tidak berubah menjadi "kantong kemiskinan baru" jauh dari mata pencaharian warga?
-

9) Pembiayaan respons: BTT dan dana siap pakai sebagai instrumen kelincahan negara

Tambahan anggaran melalui BTT untuk pemda terdampak dilaporkan sebagai bagian dukungan pusat, di samping mekanisme dana siap pakai BNPB.

Isu diskusi:

- Bagaimana menyeimbangkan kecepatan belanja darurat dengan akuntabilitas (audit, pelaporan, anti-korupsi)?

- Apakah desain BTT cukup sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan (perempuan, bayi, lansia) dan daerah paling terpencil?
-

10) Dari "respons" ke "ketangguhan": apakah kebijakan pascabencana berani menyentuh akar risiko?

Pemerintah menyebut target transisi rehab–rekon (100 hari dan 1 tahun).

Namun, ketangguhan jangka panjang menuntut diskusi yang lebih sulit: penataan ruang, pengendalian aktivitas di kawasan rawan, perlindungan daerah tangkapan air, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas.

Isu diskusi:

- Kebijakan mana yang paling "tidak populer" tetapi paling penting untuk mengurangi korban di masa depan?
 - Apa batas kewenangan negara ketika mitigasi menyentuh kepentingan ekonomi lokal?
-

Pertanyaan Diskusi untuk Kelas

Berikut pertanyaan yang bisa Bapak gunakan untuk diskusi mahasiswa (format seminar):

1. Jika Anda menjadi ketua posko terpadu: **tiga prioritas 72 jam pertama** apa dan mengapa?
2. Mana yang harus dipulihkan lebih dulu: **jalan/jembatan** atau **hunian sementara**? Jelaskan logika kebijakan.
3. Apakah "status bencana nasional" penting? Jelaskan dari sisi **anggaran, komando, dan legitimasi**.

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

4. Rancang *dashboard* 100 hari: **5 indikator output** paling esensial apa?
5. Dalam kondisi data belum lengkap, bagaimana cara memutuskan **alokasi bantuan yang adil**?
6. Pendidikan darurat: apakah sekolah darurat harus dibuka segera? Apa risiko dan mitigasinya?
7. Mengapa layanan Dukcapil harus ikut bergerak? Beri contoh dampak administratif pada akses bantuan.
8. Bagaimana desain huntap agar tidak menimbulkan masalah sosial baru (akses kerja, transport, layanan publik)?
9. Apa potensi konflik antara pemulihan cepat dan *Build Back Better* (standar lebih aman tapi lebih lama)?
10. Apa peran BUMN/industri lokal dalam pemulihan rantai pasok (BBM, listrik, telekomunikasi)?
11. Bagaimana membangun komunikasi risiko agar warga patuh evakuasi tanpa panik?
12. Pelajaran apa yang harus "diinstitusikan" agar menjadi SOP nasional, bukan sekadar respons ad hoc?

Penutup Diskusi

Jika diringkaskan secara akademik: "upaya keras" Presiden dalam bencana Sumatera dapat dibaca sebagai **perpaduan antara kepemimpinan krisis (mobilisasi cepat), tata kelola lintas lembaga (komando terpadu), dan agenda pemulihan terukur (100 hari–1 tahun)**.

Namun kualitas akhirnya tetap ditentukan oleh sesuatu yang sangat konkret: **apakah warga benar-benar pulih**—kembali memiliki rumah

yang aman, akses jalan, air bersih, sekolah, layanan kesehatan, identitas, dan mata pencaharian.

Glosarium

- **Administrasi Kependudukan (Adminduk):** layanan negara terkait identitas penduduk (mis. NIK, KK, KTP-el) dan pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan), yang menjadi prasyarat akses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lain pascabencana. ([Antara News](#))
- **BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana):** lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana secara nasional, termasuk koordinasi fase tanggap darurat serta dukungan kebijakan dan operasional. ([BPK Regulations](#))
- **BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah):** perangkat daerah yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di provinsi/kabupaten/kota, terutama pada operasi lapangan dan koordinasi lokal. ([BPK Regulations](#))
- **Build Back Better (BBB):** prinsip pemulihan yang memanfaatkan fase recovery–rehabilitasi–rekonstruksi untuk meningkatkan ketangguhan (resilience) dan mengurangi risiko bencana di masa depan, bukan sekadar “membangun seperti semula.” ([UNDRR](#))
- **Dana Siap Pakai (DSP):** dana yang dicadangkan pemerintah dan selalu tersedia untuk dipakai pada keadaan darurat/tanggap

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ([BPK Regulations](#))

- **Dashboard Pemulihan:** perangkat pemantauan berbasis indikator (output–outcome) untuk memastikan target pemulihan (mis. 100 hari, 1 tahun) dapat diukur, dilacak, dan diawasi publik. (Konsep evaluasi kebijakan; selaras dengan agenda target pemulihan pemerintah.) ([Setneg](#))
- **DAS (Daerah Aliran Sungai):** wilayah tangkapan air yang memengaruhi debit/banjir; perubahan tutupan lahan di DAS kerap meningkatkan risiko banjir bandang dan sedimentasi.
- **Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil):** unit Kemendagri yang menyelenggarakan layanan adminduk; pada situasi bencana dapat menurunkan tim untuk percepatan layanan dokumen penduduk. ([Antara News](#))
- **Evakuasi:** pemindahan penduduk dari wilayah berbahaya ke tempat aman untuk menurunkan risiko korban jiwa, biasanya diprioritaskan pada kelompok rentan.
- **Hunian Sementara (Huntara):** tempat tinggal transisi (non-permanen) untuk mengurangi kepadatan pengungsian/tenda dan menjaga kelangsungan hidup keluarga sambil menunggu hunian tetap. ([Infopublik](#))
- **Hunian Tetap (Huntap):** perumahan permanen pascabencana, idealnya dibangun di lokasi aman/relatif aman dan terintegrasi dengan layanan dasar serta akses mata pencaharian.
- **Jembatan Bailey:** jembatan rangka baja modular (umumnya bersifat darurat/sementara) yang bisa dipasang cepat untuk memulihkan konektivitas saat jembatan permanen rusak/putus. ([politeknikpu.ac.id](#))

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

- **Kesiapsiagaan (Preparedness):** kapasitas sistem (pemerintah, komunitas, infrastruktur) untuk merespons bencana secara efektif melalui rencana kontinjensi, latihan, peringatan dini, dan logistik. ([UNDRR](#))
- **Kelompok Rentan:** kelompok yang lebih berisiko terdampak (mis. anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui) dan memerlukan prioritas layanan dalam evakuasi, pengungsian, dan pemulihan.
- **Kementerian PU (Pekerjaan Umum):** kementerian yang berperan penting memulihkan konektivitas jalan/jembatan serta dukungan infrastruktur layanan dasar (mis. air bersih–sanitasi) pascabencana. ([Bina Marga Kementerian PU](#))
- **Kemenko PMK:** koordinator kebijakan lintas kementerian/lembaga pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dalam konteks bencana berperan mengawal orkestrasi lintas sektor dan target pemulihan. ([Kemenko PMK](#))
- **Koordinasi Lintas Sektor:** mekanisme integrasi keputusan dan pelaksanaan antar-K/L, TNI/Polri, pemda, BUMN, dan unsur masyarakat agar respons tidak tumpang tindih atau timpang. ([Setneg](#))
- **Last Mile Delivery:** tantangan pengiriman bantuan hingga titik paling akhir (desa/korong/jorong terpencil) ketika akses jalan, jembatan, atau telekomunikasi terputus. (Konsep logistik kebencanaan; relevan dengan catatan putusnya akses dan layanan.) ([Kemendikdasmen](#))
- **Layanan Dasar:** layanan minimal yang harus segera pulih (air bersih, sanitasi, kesehatan, listrik/energi, komunikasi, pendidikan, identitas/dokumen) agar kehidupan sosial-ekonomi dapat berjalan kembali. ([Kemendikdasmen](#))

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

- **Mitigasi:** upaya mengurangi risiko bencana sebelum kejadian (mis. penataan ruang, penguatan lereng, perlindungan DAS, infrastruktur pengendali banjir). ([UNDRR](#))
- **Operasi SAR (Search and Rescue):** operasi pencarian, pertolongan, dan penyelamatan korban—prioritas utama pada fase awal tanggap darurat.
- **Penataan Ruang:** pengaturan pemanfaatan ruang untuk menekan paparan (exposure) terhadap bahaya (hazard), misalnya larangan/penertiban aktivitas di zona rawan banjir bandang/longsor.
- **Posko Terpadu:** pusat komando/koordinasi di lokasi bencana untuk mengintegrasikan data, distribusi logistik, pengaturan relawan, dan pemulihan layanan. ([Setneg](#))
- **Rehabilitasi:** pemulihan fungsi pelayanan publik dan kehidupan masyarakat (sosial, ekonomi, infrastruktur) setelah fase darurat, sebagai jembatan menuju rekonstruksi. ([UNDRR](#))
- **Rekonstruksi:** pembangunan kembali sarana-prasarana dan sistem sosial-ekonomi secara lebih aman dan tangguh (selaras BBB) setelah bencana. ([UNDRR](#))
- **Relokasi:** pemindahan permukiman dari zona berisiko tinggi ke lokasi yang lebih aman—kebijakan yang memerlukan legitimasi sosial, kepastian lahan, dan dukungan ekonomi.
- **Resiliensi (Ketangguhan):** kemampuan komunitas/sistem untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari guncangan bencana sambil mempertahankan fungsi inti. ([UNDRR](#))
- **Risiko Bencana:** kombinasi bahaya (hazard), paparan (exposure), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) yang menentukan besaran dampak bila bencana terjadi. ([UNDRR](#))

- **Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030:** kerangka global pengurangan risiko bencana yang menekankan empat prioritas aksi dan target global, termasuk "Build Back Better" dalam pemulihan. ([UNDRR](#))
- **Tanggap Darurat:** periode respons cepat untuk menyelamatkan jiwa, memenuhi kebutuhan dasar, dan menstabilkan kondisi sebelum masuk fase rehabilitasi–rekonstruksi. ([BPK Regulations](#))
- **WASH (Water, Sanitation, and Hygiene):** paket intervensi air bersih, sanitasi, dan higienitas untuk mencegah krisis kesehatan di pengungsian. ([BPK Regulations](#))

Referensi

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, Desember). *Menko PMK: Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar prioritas nasional*. ([Kemenko PMK](#))
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2025, Desember). *Menko PMK: Penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar menunjukkan kemajuan signifikan*. ([Kemenko PMK](#))
3. Kementerian Sekretariat Negara RI. (2025, Desember). *Pemerintah kawal pemulihan Sumatera: dari tanggap darurat menuju rehabilitasi menyeluruh*. ([Setneg](#))
4. Kementerian Sekretariat Negara RI. (2025, 15 Desember). *Presiden Prabowo terima laporan Mendikdasmen terkait penanganan dampak banjir di Sumatra pada sektor pendidikan*. ([Setneg](#))

Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat" ke Rehabilitasi Menyeluruh

5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, Desember). *Kemendikdasmen perkuat dukungan pendidikan dan guru di wilayah terdampak banjir dan longsor.* ([Kemendikdasmen](#))
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, Desember). *Kemendikdasmen pastikan kelancaran layanan dokumen murid terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.* ([Kemendikdasmen](#))
7. Antara News. (2025, 12 Desember). *Kemendagri percepat pemulihan layanan adminduk di daerah bencana.* ([Antara News](#))
8. JDIH Kementerian Dalam Negeri. (2025, 1 Desember). *Salinan Surat Edaran terkait pelayanan administrasi kependudukan pada daerah terdampak bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar (PDF).* ([jdih.kemendagri.go.id](#))
9. Kementerian PANRB. (2025, Desember). *Pemerintah salurkan tambahan anggaran dan percepat layanan Dukcapil pascabencana Sumatra.* ([Menpan](#))
10. BNPB. (2025, Desember). *Pemasangan jembatan Bailey penghubung akses pascabencana Sumbar.* ([BNPB](#))
11. BNPB. (2025, Desember). *Sejumlah jembatan Bailey di Bireuen ditargetkan rampung akhir pekan ini.* ([BNPB](#))
12. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU. (2025, 8 Desember). *Kementerian PU percepat penanganan bencana di Aceh: fokus pemulihan konektivitas.* ([Bina Marga Kementerian PU](#))
13. InfoPublik. (2025, Desember). *Presiden Prabowo tinjau langsung penanganan banjir di Sumatera Barat.* ([Infopublik](#))
14. UNDRR. (2015/2019). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* (halaman publikasi dan ringkasan prioritas aksi/BBB). ([UNDRR](#))

*Johnny Wenas Polii & Rudy C Tarumingkeng: Upaya Presiden
Prabowo Menanggulangi Bencana di Sumatera -- Dari "Tanggap Darurat"
ke Rehabilitasi Menyeluruh*

15. United Nations General Assembly. (2015). *A/RES/69/283: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (PDF)*. ([United Nations](#))
16. PreventionWeb (UNDRR). (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (teks lengkap PDF)*. ([PreventionWeb](#))
17. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PDF)*. ([BPK Regulations](#))
18. Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008* (ketentuan terkait dana siap pakai dalam penanggulangan bencana). ([JDIH Kemenkeu](#))
19. Peraturan BNPB. (2008). *Pedoman penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) (PDF)*. ([BPK Regulations](#))
20. BNPB. (2014). *Dana penanggulangan bencana BNPB* (penjelasan komponen pendanaan termasuk DSP). ([BNPB](#))

ChatGPT 5.1 Thinking. [Rudy C Tarumingkeng's account](#). Accessed 21 Desember 2025. <https://chatgpt.com/c/69494c5a-6b10-8324-aa08-e9dffc680f1d>